



# DPRD Apresiasi Opini WTP Pemprom Kalbar

Rapat Paripurna PA Fraksi-Fraksi DPRD Kalbar



Paripurna

Sekda Kalbar M Zeet Hamdy Assovie bersama Ketua DPRD Kalbar Minsan sedang mendengarkan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi di DPRD Kalbar terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2012 Pemprom Kalbar. FOTO Andika Ley/Borneo Tribune

Borneo Tribune, Pontianak Sebanyak 9 Fraksi DPRD Kalbar memuji serta memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprom) Kalbar atas diraihnya Opini WTP Penguculan (WTP) atas Laporan Keuangan Pemprom Kalbar yang diberikan oleh BPK RI, serta menerima Laporan Penyampaian Akhir Kepala Daerah atas Penda-

pat Akhir (PA) Fraksi-Fraksi di DPRD Kalbar terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2012 Pemprom Kalbar. "Kami berikan apresiasi atas diraihnya Opini WTP bagi Pemprom Kalbar. Kami harap, predikat ini dapat dipertahankan," kata Juru bicara Fraksi PDIP Kalbar Martinus Sudarno, Selasa (27/8) Rapat Paripurna

DPRD Kalbar.

"Mempertahankan jauh lebih sulit dari pada meraihnya, dan meminta kepada Pemprom untuk terus mempertahankan predikat tersebut," kata Juru bicara Fraksi Partai Golkar, dan beberapa Fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Kalbar.

Menurut Gubernur Kalbar Drs Cornelis, MH transaksi dan kejadian yang penting

dalam pengelolaan keuangan daerah tercermin dalam laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalbar. Penyajian Laporan keuangan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). "Pemprom telah menetapkan kebijakan Akutansi dalam Pergub No 20/2008 yang diubah dengan Pergub 13/2010 dan diubah Guburnur dalam sambutan yang dibacakan Sekda Kalbar Drs M Zeet Hamdy Assovie, MTM pada Rapat Paripurna PA Fraksi-Fraksi di DPRD Kalbar.

Dikatakannya, penerapan kebijakan akuntansi pada awalnya memang cukup menyalitkan bagi unit kerja di lingkungan Pemprom Kalbar, dan hal ini tidak hanya dihadapi oleh Pemprom, tapi juga dihadapi oleh Pemerintah daerah lainnya di seluruh Indonesia, bahkan pemerintah pusat. "Opini Pemprom Kalbar dari WDP yang telah kita raih dari tahun 2009, 2010, dan 2011 atau dalam 3 tahun terakhir dapat kita tingkatakan jadi WTP pada la-

poran Keuangan 2012. Predikat WTP merupakan predikat tertinggi yang diberikan BPK RI, dan penilaiannya yang adil dan independen, sehingga tidak ada intervensi dari pihak manapun, ujarnya.

Guburnur juga meminta seluruh Kepala SKPD jangan terlena dengan predikat WTP ini, dan harus menjadi perhatian bersama agar tidak menjadi temuan yang berulang, karena predikat ini juga tantangan yang justru makin berat bagi Pemprom Kalbar.

"Mempertahankan jauh lebih sulit, dari pada meraihnya. Kepada seluruh Kepala SKPD agar terus meningkatkan kinerja dan semakin tertib administrasinya," ingatnya.

Beberapa upaya telah daan akan terus dilakukan oleh Pemprom setelah diperolehnya predikat opini WTP dengan meningkatkan kualitas laporan keuangan agar dengan standar Akutansi Pemerintah (SAP) melalui diklat kepada staf dan pejabat terkait pengelolaan keuangan. (Ley).